



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI
SUB UNIT KERJA : KEPALA LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAGUS PURUHITO
2. Jabatan : KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
3. NHK : 196280

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.520.000.000**

1. Tanah Seluas 480 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.610.000.000
2. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.910.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 815.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI BALENO SEDAN Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER MINIBUS Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. MOBIL, VW MINIBUS Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. MOTOR, DIABLO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOBIL, AMC CJ-7 JEEP Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
6. MOBIL, BMW 325 I AT Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
7. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE Z 2.4 AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 29.150.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 337.410.000**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.701.560.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.701.560.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.